

PROSPEKTIF BISNIS INDONESIA PASCA PUTARAN URUGUAY¹

Miranda S. Goeltom

Buoyed by the windfall oil revenues during the oil boom period (1973-1981) Indonesian non-oil exports have remained far behind. The plummeting oil and primary commodity prices in the early 1980's shocked the Indonesian government who then responded by accelerating the introduction of reform designed to stimulate and diversify non-oil exports. The steady increase of income and the fast growth of non-oil exports is proof of the sound macro-economic management that has been consistently implemented by the policy makers through out the development period. However, one crucial obstacle faced by Indonesia is the relatively high-cost economy and inefficient productive sector which has made Indonesian products less competitive to many low-labor cost economies such as China, Vietnam, Pakistan, India, etc.

Meanwhile, globalization in almost every sector – creating "borderless" world – has indicated that the success of the development program of a nation will be highly dependent on the ability of the country to be competitive in the world market. Strengthening the trust towards increasing competitiveness is even more important for a small country such as Indonesia. The need for increasing efficiency, the burden of increasing foreign debt, and the declining oil surplus has been the driving force of the reducing role of the government in the engine of development and an increased reliance on the private sector. A total improvement in productivity and efficiency is the key, and it requires a total commitment from both the government as well as the private sector who will be in the forefront of the battle.

This article attempts to explore the impact of the new globalization environment post Uruguay Round, and discusses the opportunities and challenges as well as threats to the Indonesian trade and business community. For consideration of the Indonesian business world various strategies on how to gain maximum benefit of the opportunities are also summarized. Finally, the article will conclude with some suggestions on how to strengthen the existence of Indonesian products in the world market.

¹Bentuk lain dari artikel ini pernah dipresentasikan pada Seminar Sehari "Peningkatan Perdagangan Melalui Kerjasama Internasional" yang diselenggarakan dalam rangka North Sumatera Trade Fair, di Balai Sidang Tiara Hotel, Medan, 2 Agustus 1994.

Pendahuluan

Perekonomian dunia saat ini makin terintegrasi dan hal ini sangat mempengaruhi keadaan perekonomian negara-negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang berhasil dalam perekonomiannya adalah negara yang berhasil mendorong dan mempertahankan eksistensi perdagangannya dengan cepat. Pengaruh globalisasi di hampir segala bidang yang membuat dunia ini semakin "borderless" mengindikasikan bahwa hingga akhir abad ke-20 ini, sukses atau tidaknya pembangunan suatu negara akan sangat tergantung pada kemampuan negara tersebut dalam persaingan di pasaran global. Oleh sebab itulah, Indonesia yang merupakan suatu negara kecil dalam perdagangan internasional, sangat berkepentingan dalam ikut membentuk dan melaksanakan asas-asas serta aturan-aturan perdagangan multilateral yang tercakup dalam GATT.

Sebelum 1983, pada saat hasil ekspor migas masih mencapai lebih dari 80% total ekspor serta bunga dan cicilan utang masih kecil, Indonesia masih dapat mengandalkan produksi barang dan jasa yang berorientasi dalam negeri dan lebih bersifat kebutuhan pokok. Tetapi ketika keadaan mulai berubah, yaitu ketika harga minyak mulai turun secara drastis dan bunga serta cicilan utang mulai membengkak, maka tak ada pilihan bagi Indonesia selain mengubah kebijakan ekonominya dari orientasi pasar domestik menjadi orientasi internasional. Perubahan orientasi inilah yang menjadi pedoman dalam reformasi kebijaksanaan yang mulai dilakukan pemerintah sejak awal 1980-an dan masih terus berlangsung

hingga saat ini, seperti deregulasi terakhir yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 27 Juni 1994.

Pengaruh reformasi yang dilakukan berurutan sejak 1983 tersebut terhadap kinerja perekonomian Indonesia cukup baik. Pertumbuhan ekonomi mulai kembali ke tingkat yang cukup tinggi, dengan sektor non migas sebagai sektor yang mempunyai pertumbuhan yang paling tinggi. Tetapi perubahan orientasi belum meyakinkan. Indonesia masih tetap rawan terhadap ekspansi konsumsi lokal yang berlebihan, seperti yang terjadi pada beberapa bulan terakhir ini, dimana impor barang modal dan barang antara mengalami kenaikan yang cukup besar, sedangkan ekspor barang manufaktur tidak meningkat terlalu besar. Fenomena ini menggembarakan bahwa produksi nasional lebih banyak memanfaatkan pasar domestik yang masih penuh dengan proteksi. Sementara itu, pola perdagangan luar negeri telah mulai berubah. Sejak tahun 1983, pangsa ekspor nonmigas mulai meningkat secara konsisten, yang bukan saja disebabkan karena penurunan ekspor migas, tetapi juga karena adanya ekspansi progresif dari ekspor nonmigas.

Dengan demikian jelas bahwa struktur perekonomian Indonesia masih terus mengalami proses transformasi, yang diwarnai dengan usaha menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru yang bertumbuh sekitar 2,4 juta per tahun, pada saat tingkat *underemployment* masih mencapai lebih dari 35%. Runtuhnya sistem ekonomi sosialis serta tercapainya kesepakatan Putaran Uruguay, menambah pelikannya permasalahan pembangunan ekonomi-sosial yang dihadapi Indonesia. Sementara itu perekonomian kita masih belum sepenuhnya ber-

hasil menekan biaya ekonomi yang tinggi, sehingga tingkat ICOR kita masih tergolong cukup tinggi dibandingkan negara lainnya dengan tingkat pembangunan yang setara dengan Indonesia. Besarnya tekanan beban utang luar negeri yang terus membengkak, sementara surplus dari neraca perdagangan migas semakin mengecil, menambah peliknya persoalan yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan jangka panjang tahap kedua. Bahkan beberapa tahun belakangan ini terlihat gejala mulai berkurangnya daya saing produk Indonesia karena reformasi perdagangan dan investasi yang sangat cepat di negara berkembang lainnya, sementara peraturan perdagangan dan investasi kita dirasakan masih sangat rumit dan tidak jelas. Demikian pula mulai terasa peningkatan biaya buruh dan tuntutan pekerja di berbagai sektor manufaktur, yang mungkin dapat merupakan sumber ketidakpastian bagi para investor.

Jelas bahwa tantangan Indonesia di masa mendatang adalah bagaimana mencapai sukses dalam masa transisi ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi, di tengah-tengah tantangan globalisasi ekonomi yang sangat kompetitif di hampir seluruh bidang. Bertumbuhnya tingkat pendapatan masyarakat dengan sendirinya telah menimbulkan perbedaan jenis dan kualitas permintaan akan barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi di masa datang memerlukan perubahan dalam penanganan makroekonomi dan reformasi kebijakan sektoral, dengan komitmen yang lebih kuat untuk meningkatkan peranan sektor swasta dalam perekonomian. Oleh sebab itu, keahlian manajemen makroekonomi dengan mendasarkannya pada dinamika yang terjadi pada sektor pelaku mikro – yaitu

para pengusaha – merupakan prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perbaikan ekonomi secara keseluruhan dalam produktivitas dan efisiensi akan sangat penting artinya dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Meningkatnya permintaan buruh serta reformasi ekonomi yang sangat agresif di negara berkembang lainnya dapat mengikis daya saing Indonesia dalam produk yang padat karya, sehingga perhatian yang lebih besar harus diberikan untuk memperbaiki penggunaan teknologi yang menghasilkan nilai tambah produksi yang lebih tinggi. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mempersiapkan sarana untuk meningkatkan sumberdaya manusia dalam rangka menyongsong era teknologi tinggi demi peningkatan daya saing. Sikap agresif dan konsisten dalam kebijakan makroekonomi merupakan keharusan, 'a must', kalau tidak ingin kehilangan momentum dan dinamika pembangunan yang ada sekarang.

Namun sangat disadari bahwa segala usaha dan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim makroekonomi yang sehat dan kondusif bagi perekonomian akan tidak mempunyai arti, apabila pelaku ekonomi lainnya – yakni sektor swasta – tidak cukup tanggap dalam mengantisipasi perubahan aturan main yang terjadi di dunia ini. Karena, pada akhirnya, dari hasil kerja merekalah kinerja ekonomi kita diukur.

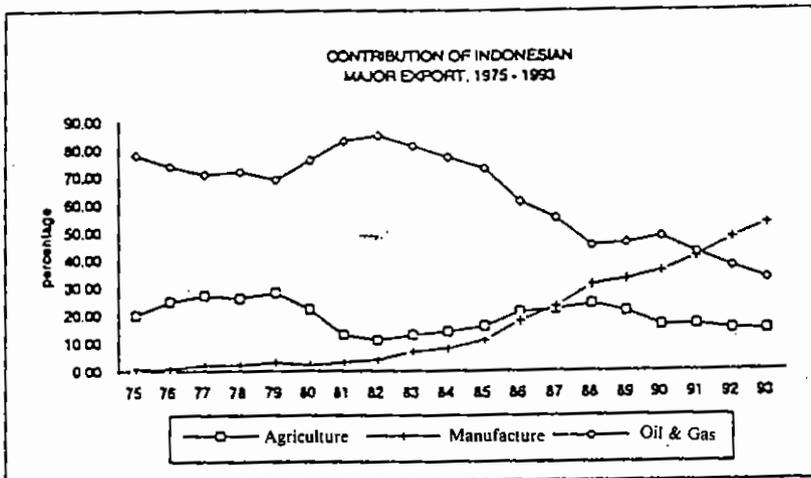
Tulisan ini bermaksud mengupas berbagai aspek dunia usaha yang dipengaruhi oleh hasil Putaran Uruguay, peluang dan tantangan yang ditimbulkannya, serta strategi yang perlu diambil oleh dunia usaha untuk dapat menarik manfaat sebesar-besarnya dari peluang yang ada. Keseluruhan

Tabel 1. INDONESIA: Komposisi dan Pertumbuhan Ekspor (fob: dalam juta US\$), 1975-1993*

TAHUN	EKSPOR TOTAL	EKSPOR PERTANIAN	%	EKSPOR MANUFAKTUR	%	EKSPOR NON MIGAS	%	EKSPOR MIGAS	%	PERTUMBUHAN EKSPOR NONMIGAS TAHUNAN
1975	7,102.50	1,420.50	20.00	71.00	1.00	1,491.50	21.00	5,539.95	78.00	(22.75)
1976	8,546.50	2,136.60	25.00	85.50	1.00	2,222.10	26.00	6,324.41	74.00	0.08
1977	10,852.70	2,930.20	27.00	217.10	2.00	3,147.30	29.00	7,705.42	71.00	99.96
1978	11,643.20	3,027.20	26.00	232.90	2.00	3,260.10	28.00	8,383.10	72.00	(0.01)
1979	15,590.10	4,365.20	28.00	467.70	3.00	4,832.90	31.00	10,757.17	69.00	49.98
1980	23,950.40	5,269.10	22.00	479.00	2.00	5,748.10	24.00	18,202.30	76.00	(33.33)
1981	25,164.50	3,271.40	13.00	754.90	3.00	4,026.30	16.00	20,886.54	83.00	50.00
1982	22,328.30	2,456.10	11.00	893.10	4.00	3,349.20	15.00	18,979.06	85.00	33.33
1983	21,145.90	2,749.00	13.00	1,480.20	7.00	4,229.20	20.00	17,128.18	81.00	75.00
1984	21,887.80	3,064.30	14.00	1,751.00	8.00	4,815.30	22.00	16,853.61	77.00	14.29
1985	18,568.70	2,971.00	16.00	2,042.60	11.00	5,013.60	27.00	13,555.15	73.00	37.50
1986	14,805.00	3,109.10	21.00	2,664.90	18.00	5,774.00	39.00	9,031.05	61.00	63.63
1987	17,135.60	3,769.80	22.00	3,941.20	23.00	7,711.00	45.00	9,424.58	55.00	27.78
1988	19,218.50	4,612.40	24.00	5,957.70	31.00	10,570.10	55.00	8,648.33	45.00	34.78
1989	22,158.90	4,704.10	21.23	7,273.90	32.83	11,978.00	54.06	10,180.90	45.94	5.89
1990	25,675.30	4,153.80	16.18	9,163.00	35.69	13,316.80	51.87	12,358.50	48.13	8.72
1991	29,141.23	4,788.83	16.43	11,960.17	41.04	16,749.00	57.48	12,392.23	42.52	15.00
1992	33,967.00	5,044.78	14.85	16,212.86	47.73	21,257.64	62.58	12,709.36	37.42	16.30
1993*	20,985.18	3,041.28	14.49	11,063.47	52.72	14,104.75	67.21	6,880.44	32.79	10.45
PERTUMBUHAN										
80-83	(4.07)	(19.50)		45.66		(9.72)		(2.01)		
84-86	(17.76)	0.73		123.37						
						9.50		(26.80)		
86-90	14.76	7.51		36.17		23.23		8.16		
86-92	14.84	8.40		25.11		24.26		5.86		
90-92	15.02	10.20		33.02		26.34		1.41		

Keterangan : Pertanian: SITC 0, 1, 2 (kecuali 27 & 28) dan 4
 Minyak dan Gas: SITC 27, 28, 3, 68
 Manufaktur: SITC 5,6 (kecuali 68), 7, 8 dan 9
 Ekspor Nonmigas = Ekspor Pertanian + Ekspor Manufaktur
 * Sampai Juli 1993.

Sumber : Dihitung dari Statistik Perdagangan Indonesia, Biro Pusat Statistik.



analisis akan didasarkan pada data aktual mengenai kinerja sektor perdagangan luar negeri kita, gambaran mengenai 20 komoditas ekspor unggulan dan *revealed comparative advantage* berbagai komoditas ekspor kita, serta 10 komoditas impor terbesar di Indonesia. Untuk menggambarkan saingan yang terlihat di masa lalu sebagai dasar gambaran saingan di masa datang, maka data dari beberapa negara tetangga di Asia Pasifik juga akan diberikan. Akhirnya, tulisan ini akan mencoba memberikan beberapa pendapat mengenai apa yang perlu dilakukan oleh para pengusaha Indonesia di masa pasca GATT, agar eksistensi mereka semakin kokoh karena mampu bersikap bijaksana dalam menghadapi dinamika kehidupan yang riil.

Perubahan besar-besaran yang terjadi membawa berbagai tantangan, ancaman dan sekaligus peluang yang mengandung berbagai bahaya. Sikap *status quo* yang mencerminkan konservatisme dengan memilih menghindari perubahan agar terlepas dari bahaya akan menghilangkan kesempatan yang ada. Oleh sebab itu, *sikap progresif* yang memilih untuk memanfaatkan perubahan agar mendapatkan peluang, perlu dipegang sebagai prinsip ekonomi yang dijalankan dengan konsisten dan waspada.

Perkembangan Perdagangan Indonesia

Diversifikasi Komoditas Ekspor dan Negara Tujuan Ekspor

Perkembangan komposisi ekspor barang Indonesia, perkembangan perdagangan jasa, serta pangsa nilai ekspor Indonesia ke berbagai negara

mitra dagang utama dalam periode 1988-1993, dapat dilihat pada tabel 1, 2 dan 3.

Jelas terlihat pada tabel 1, betapa sejak 1983 pangsa ekspor migas terus menurun dari 85% menjadi sekitar 33% pada tahun 1993, sedangkan peranan ekspor nonmigas terus meningkat. Peningkatan ekspor nonmigas dimotori oleh peningkatan ekspor manufaktur yang sangat fantastis, sehingga sumbangan ekspor manufaktur terhadap nilai ekspor total meningkat dari sekitar 7% pada tahun 1983 menjadi lebih dari 50% pada tahun 1993. Diversifikasi ekspor barang ternyata belum diikuti dengan perubahan ekspor maupun impor jasa, seperti terlihat pada tabel 2. Masih terdapat banyak kelemahan yang fundamental sehingga jasa asuransi dan pengangkutan masih belum menghasilkan devisa dan bahkan sangat banyak menghambur devisa, serta '*kurangnya catatan*' berbagai transaksi jasa pendapatan tenaga kerja maupun *factor income* lainnya, menyebabkan neraca jasa terus menerus mengalami defisit yang sangat besar, meskipun pembayaran bunga utang luar negeri telah dikeluarkan dari perhitungan. Ini berarti, masih besar peluang ekspor sektor jasa yang belum kita manfaatkan sepenuhnya selama ini.

Tabel 3 menunjukkan bahwa sampai kini mitra dagang utama bagi produk ekspor Indonesia adalah Jepang, yang kemudian disusul oleh Amerika Serikat. Dengan demikian, keadaan perekonomian kedua negara adidaya tersebut akan sangat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia, dan oleh karena itu perlu diperhitungkan sebagai salah satu variabel di dalam memperkirakan peluang ekspor Indonesia. Namun demikian, tabel yang sama menunjukkan, bahwa sejalan dengan kemajuan ekonomi di

Tabel 2. INDONESIA: Perdagangan Jasa, 1975-1992 (1975 = 100; juta SDR, 1983 - 1992 : juta US\$)

	1975	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
BETBERANGAN														
PEMERIAHAN :														
PELAYARAN :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTASI LAINNYA	17	46	38	62	50	49	42	39	44	54	70	81	87	279
WISATA	28	133	194	235	396	460	548	647	924	1283	2153	2315	2315	8729
PENDAPATAN INVESTASI LANGSUNG LAINNYA	0	0	64	309	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENDAPATAN BARANG DAN JASA RESMI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENDAPATAN TENAGA KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENDAPATAN PROPERTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENDAPATAN BARANG DAN JASA LAINNYA	32	72	130	141	180	61	254	159	100	42	183	265	256	228
PEMBAYARAN :														
PELAYARAN :														
TRANSPORTASI LAINNYA	(57)	(118)	(126)	(185)	(206)	(178)	(178)	(178)	(154)	(152)	(177)	(211)	(269)	(269)
WISATA	(70)	(348)	(421)	(511)	(521)	(481)	(481)	(481)	(481)	(481)	(481)	(481)	(481)	(481)
PENDAPATAN INVESTASI LANGSUNG LAINNYA	(108)	(242)	(311)	(354)	(424)	(274)	(274)	(274)	(274)	(274)	(274)	(274)	(274)	(274)
PENDAPATAN BARANG DAN JASA RESMI LAINNYA	(23)	(44)	(115)	(118)	(83)	(156)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)
PENDAPATAN TENAGA KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENDAPATAN PROPERTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENDAPATAN BARANG DAN JASA LAINNYA	(113)	(962)	(1158)	(1626)	(1376)	(1579)	(1270)	(1911)	(1911)	(2061)	(2311)	(2633)	(1997)	(1961)
JASA BESEHU :														
PELAYARAN :														
TRANSPORTASI LAINNYA	(57)	(118)	(126)	(185)	(206)	(178)	(178)	(178)	(154)	(152)	(177)	(211)	(269)	(269)
WISATA	(70)	(348)	(421)	(511)	(521)	(481)	(481)	(481)	(481)	(481)	(481)	(481)	(481)	(481)
PENDAPATAN INVESTASI LANGSUNG LAINNYA	(108)	(242)	(311)	(354)	(424)	(274)	(274)	(274)	(274)	(274)	(274)	(274)	(274)	(274)
PENDAPATAN BARANG DAN JASA RESMI LAINNYA	(23)	(44)	(115)	(118)	(83)	(156)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)
PENDAPATAN TENAGA KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENDAPATAN PROPERTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENDAPATAN BARANG DAN JASA LAINNYA	(28)	(99)	(126)	(167)	(127)	(151)	(149)	(183)	(201)	(218)	(218)	(184)	(171)	(171)
PERSENTASE (%) :														
PELAYARAN :														
TRANSPORTASI LAINNYA	33,2	40,9	33,3	37,7	30,8	33,7	32,9	32,6	33,9	33,5	33,1	33,1	33,1	33,1
WISATA	4,38	17,2	17,5	18,1	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
PENDAPATAN INVESTASI LANGSUNG LAINNYA	46,5	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
PENDAPATAN BARANG DAN JASA RESMI LAINNYA	0,84	1,33	1,33	1,23	0,84	1,23	1,13	1,13	1,25	1,24	1,19	1,19	1,19	1,19
PENDAPATAN TENAGA KERJA	14,81	18,56	20,74	8,70	15,01	14,88	26,74	21,97	22,28	19,28	15,79	14,09	14,09	14,09
PENDAPATAN PROPERTI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PERDAPATAN BARANG DAN JASA LAINNYA														
RASIO TOTAL PERDAPATAN JASA TDP TOTAL PERDAPANGAN	0,33	0,21	0,27	0,28	0,37	0,31	0,35	0,37	0,35	0,33	0,30	0,29	0,30	0,30
	0,19	0,17	0,21	0,22	0,23	0,26	0,27	0,26	0,25	0,25	0,23	0,23	0,23	0,23
Pertumbuhan Persentase														
PELAYARAN :														
TRANSPORTASI LAINNYA	(4,46)	0,08	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
WISATA	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35
PENDAPATAN INVESTASI LANGSUNG LAINNYA	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)
PENDAPATAN BARANG DAN JASA RESMI LAINNYA	(1,06)	(1,06)	(1,06)	(1,06)	(1,06)	(1,06)	(1,06)	(1,06)	(1,06)	(1,06)	(1,06)	(1,06)	(1,06)	(1,06)
PENDAPATAN TENAGA KERJA	9,81	(17,58)	(17,58)	(17,58)	(17,58)	(17,58)	(17,58)	(17,58)	(17,58)	(17,58)	(17,58)	(17,58)	(17,58)	(17,58)
PENDAPATAN PROPERTI	4,62	(6,63)	(6,63)	(6,63)	(6,63)	(6,63)	(6,63)	(6,63)	(6,63)	(6,63)	(6,63)	(6,63)	(6,63)	(6,63)
1980-1992														
PELAYARAN :														
TRANSPORTASI LAINNYA	(2,22)	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
WISATA	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)
PENDAPATAN INVESTASI LANGSUNG LAINNYA	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)
PENDAPATAN BARANG DAN JASA RESMI LAINNYA	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)
PENDAPATAN TENAGA KERJA	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)
PENDAPATAN PROPERTI	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)
1990-1992														
PELAYARAN :														
TRANSPORTASI LAINNYA	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)
WISATA	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)
PENDAPATAN INVESTASI LANGSUNG LAINNYA	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)
PENDAPATAN BARANG DAN JASA RESMI LAINNYA	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)
PENDAPATAN TENAGA KERJA	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)
PENDAPATAN PROPERTI	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)

Sumber : Dohing dari Balance of Payments Statistics, IMF.

Tabel 3. INDONESIA: Pangsa Nilai Ekspor Indonesia Ke Negara Lain

NO.	NEGARA ASAL	1988	%	1989	%	1990	%	1991	%	1992	%	1993	%
1	JEPANG	8.018.275,232	42.71	9.321.151,679	43.21	10.923.442,331	43.49	10.766.831,318	37.71	10.760.521,562	37.71	7.484.238,655	31.85
2	AMERIKA SERIKAT	3.073.721,094	16.37	3.496.572,484	16.21	3.364.587,947	13.39	3.508.402,097	12.29	4.419.105,462	12.29	3.248.008,899	13.82
3	SINGAPURA	1.653.227,947	8.81	1.817.896,196	8.43	1.902.142,144	7.57	2.409.767,098	8.44	3.213.542,695	9.98	2.224.123,508	9.47
4	REPUBLIK KOREA	840.329,437	4.48	921.470,029	4.27	1.363.299,683	5.43	1.917.717,003	6.72	2.083.284,855	6.27	1.522.486,997	6.48
5	REPUBLIK RAKYAT CINA	491.824,885	2.62	568.502,309	2.64	834.385,776	3.32	1.190.896,671	4.17	1.396.437,478	4.20	872.466,662	3.71
6	TAIWAN	478.834,979	2.55	575.991,984	2.67	849.242,302	3.38	1.056.436,591	3.70	1.279.304,957	3.85	937.979,632	3.99
7	BELANDA	646.276,699	3.44	681.280,118	3.16	723.070,175	2.88	837.526,949	2.93	1.100.286,955	3.31	681.776,533	2.94
8	JERMAN BARAT	455.511,435	2.41	492.857,050	2.28	749.912,844	2.99	907.127,692	3.18	977.797,318	2.94	722.292,715	3.07
9	HONG KONG	554.380,398	2.95	548.717,755	2.54	617.321,233	2.46	703.181,569	2.46	881.102,972	2.65	585.138,147	2.49
10	INGGRIS	348.818,479	1.86	383.616,942	1.78	516.779,706	2.06	653.923,769	2.29	843.811,191	2.54	622.070,781	2.65
11	AUSTRALIA	293.270,935	1.56	386.612,720	1.79	403.037,079	1.60	627.950,871	2.20	746.124,834	2.25	499.436,442	2.13
12	SAUDI ARABIA	170.046,431	0.91	184.422,569	0.86	322.769,333	1.28	457.961,239	1.60	583.054,554	1.76	399.116,415	1.70
13	ITALIA	220.508,333	1.17	234.148,822	1.09	276.132,742	1.10	381.479,396	1.34	582.845,750	1.75	420.870,655	1.79
14	PERANCIS	164.373,401	0.88	208.893,212	0.97	285.736,225	1.14	385.942,847	1.35	494.699,986	1.49	322.284,091	1.37
15	MALAYSIA	184.031,620	0.98	220.112,934	1.02	253.204,762	1.01	341.766,727	1.20	487.535,162	1.47	380.777,357	1.62
16	BELGIA/LUXEMBURG	176.963,497	0.94	173.010,365	0.80	209.860,937	0.84	257.651,260	0.90	401.218,607	1.21	235.008,393	1.00
17	PERSEKUTUAN EMIRAT ARAB	86.530,768	0.46	116.685,286	0.54	140.836,663	0.56	265.574,340	0.93	376.900,658	1.13	341.543,584	1.45
18	MUANGTHAI	151.432,697	0.81	234.313,686	1.09	188.499,685	0.75	267.184,003	0.94	352.799,289	1.06	304.191,044	1.29
19	KANADA	100.562,583	0.54	107.789,566	0.50	138.515,883	0.55	171.946,013	0.60	289.032,191	0.87	197.191,259	0.84
20	SPANYOL	77.580,632	0.41	79.911,724	0.37	132.179,265	0.61	169.223,312	0.59	254.576,623	0.77	195.349,282	0.83
21	FILIPINA	56.463,347	0.30	149.098,761	0.69	160.603,953	0.64	169.670,153	0.59	181.307,451	0.55	189.795,680	0.81
22	VIETNAM	19.225,416	0.10	33.166,995	0.16	27.302,198	0.11	140.882,495	0.49	165.349,284	0.50	108.925,887	0.46
23	MESIR	62.262,125	0.33	42.340,036	0.20	69.976,894	0.28	154.431,697	0.54	164.131,517	0.49	128.630,289	0.55
24	PANAMA	5.053,547	0.03	7.133,899	0.03	19.013,020	0.08	68.729,116	0.24	113.191,392	0.34	87.834,442	0.37
25	DENMARK	20.445,772	0.11	35.546,307	0.16	53.963,083	0.21	74.246,646	0.26	96.789,714	0.29	59.129,113	0.25
26	BANGLADESH	50.235,469	0.27	61.711,720	0.29	61.992,409	0.25	66.148,650	0.23	88.635,559	0.26	71.419,633	0.30
27	MERIKO	18.256,024	0.10	25.677,188	0.12	36.026,395	0.14	56.722,263	0.20	87.323,071	0.26	85.186,086	0.36
28	PAKISTAN	38.430,735	0.20	46.265,759	0.21	45.992,725	0.18	48.116,862	0.24	80.807,654	0.24	93.557,011	0.40
29	RUSIA	37.926,934	0.20	99.837,751	0.46	89.801,075	0.32	39.791,132	0.14	69.873,865	0.21	51.066,276	0.22
30	INDIA	67.258,831	0.36	51.023,631	0.24	59.846,238	0.24	56.997,623	0.20	69.590,930	0.21	59.844,370	0.25
31	SRI LANGKA	18.419,805	0.10	21.517,089	0.10	31.143,712	0.12	30.318,173	0.11	60.432,092	0.18	58.594,318	0.25
32	IRAN	12.277,538	0.07	36.418,487	0.17	54.358,540	0.22	88.368,884	0.31	54.981,164	0.17	8.057,966	0.07
33	KURAKSAO	1.410,033	0.01	3.976,188	0.02	7.823,728	0.03	15.620,857	0.05	48.916,398	0.15	16.207,928	0.07
34	NIGERIA	6.122,084	0.03	10.970,749	0.05	16.358,073	0.07	26.118,502	0.09	47.873,883	0.14	35.065,383	0.15
35	IRLANDIA	17.062,651	0.09	21.833,741	0.10	34.609,918	0.14	43.133,911	0.15	46.275,996	0.14	25.492,144	0.11
36	TURKI	3.974,012	0.02	6.627,100	0.03	9.892,336	0.04	15.480,434	0.05	45.242,261	0.14	54.351,144	0.23
37	KUWAIT	34.789,108	0.19	40.806,451	0.19	32.267,896	0.13	12.090,596	0.04	45.621,164	0.14	36.735,303	0.16
38	SWEDIA	24.860,151	0.13	25.884,873	0.12	34.276,999	0.14	47.380,385	0.17	45.106,971	0.14	32.840,048	0.14
39	ALJAZAIR	74.154,612	0.39	61.097,826	0.28	46.693,277	0.19	78.007,243	0.27	41.630,639	0.12	48.014,242	0.20
40	POLANDIA	19.599,900	0.10	34.973,862	0.16	21.256,231	0.08	25.980,466	0.09	39.671,335	0.12	38.031,881	0.16
	TOTAL	18.774.531,026	100	21.570.258,232	100	25.119.687,325	100,00	28.553.910,383	100,00	33.216.711,099	100,00	21.495.130,817	100,00
	LAINNYA	443.976,501		588.597,527		555.643,747		588.459,149		750.236,086		618.457,568	
	GRAND TOTAL	19.218.507,527		22.158.855,759		25.675.331,072		29.142.369,732		33.966.997,185		24.113.588,385	

NIE's (HongKong, Korea, Singapore, dan Taiwan), perdagangan kita dengan kedua negara tersebut juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir, kemajuan yang dicapai Malaysia, Thailand bersama Indonesia sangat menunjang *intra-regional trade*, yang pada awal 1980-an masih belum berarti sama sekali. Apabila diperhatikan lebih lanjut, selain peningkatan ekspor ke negara-negara Eropa, data yang ada juga menunjukkan bahwa ekspor berbagai komoditas nonmigas kita semakin merambah ke berbagai pasar non-tradisional seperti misalnya Timur-Tengah dan beberapa negara Amerika Latin di bagian pesisir Pasifik.

Perubahan Peringkat Komoditas Ekspor Non-migas, Indonesia dan Berbagai Negara Pasifik

Tabel 4 menunjukkan perubahan komposisi komoditas ekspor non-migas andalan Indonesia sejak 1980. Jelas bahwa selain plywood dan hasil industri kayu lainnya, maka sejak 1986, tekstil dan alas kaki mulai muncul dan merupakan primadona ekspor nonmigas kita. Bahkan apabila tekstil dan berbagai jenis pakaian jadi dijadikan satu, maka sejak 1992 tekstil meraih peringkat pertama dalam komoditas ekspor nonmigas kita, seperti terlihat dalam tabel 5-a. Sedangkan di lain pihak, komposisi

impor kita masih didominasi oleh impor bahan baku seperti bahan kimia dan lainnya (tabel 5-b), serta impor barang modal masih tetap menonjol selama kurun waktu 1982-1993. Tabel 6 menggambarkan daya saing yang diukur dengan metode *revealed comparative advantage* (RCA) yang dikembangkan oleh Bela Balassa (1965)² dan dipadu dengan berbagai metode lainnya yang dilakukan LPEM-FEUI seperti *constant-market-share-analysis* (CMSA) dan *Acceleration Ratio*. Pengelompokan dilakukan berdasarkan jenis komoditas yang sedang menanjak daya saingnya (*sunrise commodity*), jenis komoditas yang mulai suram (*sunset commodity*) dan yang kurang lebih stabil daya saingnya (*stagnant commodity*).

Bagi Indonesia sendiri, setelah seperangkat deregulasi di bidang perdagangan dan investasi dilakukan secara beruntun sejak 1983, produk ekspor Indonesia yang mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah produk yang padat bahan (*resource base*) dan padat karya (*unskilled intensive*). Kelompok produk yang mengalami peningkatan yang paling tinggi adalah SITC 6 (*basic manufactures*) dan SITC 8 (*miscellaneous manufacture*). Daya saing yang diukur dengan *Revealed Comparative Advantage* RCA, di mana bila $RCA > 1$ maka berarti produk itu mempunyai keunggulan komparatif, menunjukkan bahwa komoditas yang mempunyai RCA yang besar adalah dari kelom-

²Formula RCA adalah sebagai berikut:

$$RCA = \frac{X_{ij} / X_j}{X_{iw} / X_w}$$

dimana X_{ij} = nilai ekspor komoditi *i* di negara *j*
 X_j = total nilai ekspor negara *j*
 X_{iw} = nilai ekspor komoditi *i* di dunia *w*
 X_w = total nilai ekspor dunia *w*

Tabel 4. INDONESIA: Dua puluh Komoditi Utama Ekspor Non Migas dan persentasenya terhadap Total Ekspor

PERINGKAT	1995		1996		1997		TOTAL
	PERINGKAT	KETERANGAN/SITC	PERINGKAT	KETERANGAN/SITC	PERINGKAT	KETERANGAN/SITC	
1	KAYU, GABUS/02	7.12	KAYU LAPIS/04	7.61	KAYU LAPIS/04	10.87	
2	KARET ALAM/21	5.36	KOPI DAN PENGANTINYA/071	5.55	KARET ALAM/21	3.33	
3	KOP/001	3.00	KARET BUATAN/21 BUKU/027	4.82	UDANG, KERANG/06	2.71	
4	TIMAH/08	1.91	BISI NIKEL DAN PEKATANNYA/283	1.00	BISI NIKEL DAN PEKATANNYA/283	2.22	
5	TIMAH/08	1.91	UDANG, KERANG & SEJENNYA/06	2.00	KAIN TENUN DARI SERAT BIJUAN/633	2.12	
6	KAYU/03	1.26	KAYU DIOLAH Sederhana/248	1.86	PAKAIAN WANITA, JAKET BUKAN RAJUTAN/642	1.75	
7	MINYAK MABATI, CNR ATAU KENTAL/422	1.16	KAYU DIOLAH Sederhana/248	1.86	PAKAIAN WANITA, JAKET BUKAN RAJUTAN/641	1.74	
8	MINYAK MABATI, CNR ATAU BEKU/011	0.96	REMPAH-REMPAH/003	1.41	KOPI DAN PENGANTINYA/071	1.48	
9	IKAN SEGAR, DINGIN ATAU BEKU/011	0.96	ALUMINIUM/84	1.31	BARANG LAIN DARI TEKSTIL/443	1.47	
10	TEH/074	0.51	PAKAIAN PRIA, JAKET RAJUTAN/641	1.26	MINYAK & LEMAK TUMBUHAN KENTAL/422	1.46	
11	MAKANAN TERNAK/081	0.48	TIMAH/07	1.00	PERABOTAN/21	1.11	
12	MAKANAN PRIA, JAKET BUKAN RAJUTAN/641	0.45	PUPIK OLAHAN PABRIK/562	0.86	KAYU DIOLAH Sederhana/248	0.85	
13	MESIN KHUSUS UNTUK INDUSTRI/729	0.43	MINYAK TUMBUHAN LAINNYA/424	0.84	BISI NIKEL DAN PEKATANNYA/284	0.87	
14	BAHAN MENTAH DARI TUMBUHAN/292	0.38	PAKAIAN WANITA, JAKET RAJUTAN/644	0.76	PAKAIAN WANITA	0.79	
15	REMPAH-REMPAH/005	0.34	COTTON FABRICS/032	0.75	KAYU DIOLAH Sederhana/248	0.89	
16	KAYU, GABUS DAN OLANANNYA/631	0.31	BAHAN MENTAH DARI TUMBUHAN/292	0.74	ALUMINIUM/84	0.87	
17	TEMBAKU, BELUM DIOLAH/731	0.27	TEH/074	0.67	KAYU DIOLAH Sederhana/248	0.87	
18	SAYURAN SEGAR, DINGIN/064	0.23	KAIN TENUN DARI SERAT BIJUAN/633	0.67	ALUMINIUM/84	0.87	
19	PUPIK BUKAN PABRIK/561	0.13	PAKAIAN WANITA, JAKET BUKAN RAJUTAN/642	0.54	MINYAK & LEMAK TUMBUHAN/248	0.79	
20	TRANSAKSI KHUSUS/691	0.15	MAKANAN TERNAK/081	0.54	PUPIK BUKAN PABRIK/562	0.75	
			TEMBAKU, BELUM DIOLAH/731	0.42	TEH/074	0.71	
TOTAL		71.18		78.49		78.34	
1	KAYU, LAPIS/04	10.41	KAYU LAPIS/04	10.31	KAYU LAPIS/04	12.50	
2	SEPAU DAN ALAS KAKI/011	3.41	KAIN TENUN DARI SERAT BIJUAN/633	3.90	SEPAU DAN ALAS KAKI/011	4.64	
3	KARET ALAM/21	3.33	KARET ALAM/21	3.90	KAIN TENUN DARI SERAT BIJUAN/633	3.26	
4	UDANG, KERANG DAN SEJENNYA/06	2.71	PAKAIAN WANITA, BUKAN RAJUTAN/642	3.07	PAKAIAN WANITA, BUKAN RAJUTAN/642	3.00	
5	KAIN TENUN DARI SERAT BIJUAN/633	2.68	PAKAIAN WANITA, BUKAN RAJUTAN/642	2.63	KARET ALAM/21	2.72	
6	PAKAIAN WANITA, JAKET BUKAN RAJUTAN/641	2.24	PAKAIAN PRIA, BUKAN RAJUTAN/641	2.55	PAKAIAN PRIA, BUKAN RAJUTAN/641	2.53	
7	PAKAIAN WANITA, JAKET BUKAN RAJUTAN/642	2.16	UDANG, KERANG DAN SEJENNYA/06	2.32	BARANG LAIN DARI TEKSTIL/443	2.12	
8	BISI NIKEL DAN PEKATANNYA/283	1.68	BISI NIKEL DAN PEKATANNYA/283	2.15	UDANG, KERANG DAN SEJENNYA/06	2.12	
9	BISI NIKEL DAN PEKATANNYA/283	1.68	BISI NIKEL DAN PEKATANNYA/283	2.15	BISI NIKEL DAN PEKATANNYA/283	2.12	
10	MINYAK & LEMAK TUMBUHAN KENTAL/422	1.57	MINYAK & LEMAK TUMBUHAN KENTAL/422	1.94	PERABOTAN/21	1.80	
11	PERABOTAN/21	1.32	BATUBARA/321	1.77	MINYAK & LEMAK TUMBUHAN KENTAL/422	1.73	
12	KOPI DAN PENGANTINYA/071	1.29	PERABOTAN/21	1.44	BATU BARA/321	1.53	
13	KAYU DIOLAH Sederhana/248	1.22	KAIN TENUNAN, KAPAS/632	1.31	KAYU OLANAH/633	1.37	
14	PUPIK BUKAN PABRIK/562	1.02	TULU, KAIN BELUDRU (TEKSTIL)/656	1.19	TULU, KAIN BELUDRU (TEKSTIL)/656	1.08	
15	MINYAK & LEMAK TUMBUHAN/248	0.96	BENANG TEKSTIL/651	1.01	IKAN SEGAR, DINGIN DAN BEKU/04	1.05	
16	KAIN TENUNAN, KAPAS/632	0.91	KAYU DIOLAH Sederhana/248	0.97	BEANANG TEKSTIL/651	0.99	
17	BATU BARA/321	0.91	KAYU OLANAH/633	0.96	KERIAS DAN KERTAS KARTON/641	0.99	
18	KAYU OLANAH/633	0.88	PAKAIAN PRIA, RAJUTAN/641	0.87	KAYU DIOLAH Sederhana/248	0.94	
19	KAYU OLANAH/633	0.86	KAYU OLANAH/633	0.83	KOPI DAN PENGANTINYA/071	0.87	
20	IKAN SEGAR, DINGIN DAN BEKU/04	0.87	KERTAS DAN KERTAS KARTON/641	0.82	KAIN TENUNAN, KAPAS/632	0.80	
TOTAL		42.17		46.08		48.34	

Sumber: Dihitung dari Statistik Perdagangan, Ekspor, Bero Statistik
• Sampai Juli 1997

Tabel 5.a. Komposisi Peringkat Komoditas Ekspor, 1982 - 1993

Komoditas	1993	1992	1991	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982
Tekstil, pakaian	1	1	2	2	2	3	5	4	4	4	4
Kayu lapis dan hasil kayu	2	2	1	1	1	1	9	6	9	9	8
Plastik, karet	3	3	3	4	3	4	7	8	8	8	6
Sepatu, payung	4	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesin, elektronik	5	-	-	-	-	-	6	7	6	5	5
Hasil Hewani	6	4	5	6	6	6	-	10	7	10	9
Logam Dasar	7	5	4	3	4	4	4	3	3	2	3
Hasil nabati	8	7	6	5	5	5	1	1	1	1	1
Minyak, dan lemak	9	10	10	7	7	7	3	5	5	6	7
Makanan dan tembakau	10	9	9	8	9	9	2	2	2	3	2

Tabel 5.b. Komposisi Peringkat Komoditas Impor, 1982 - 1993

Komoditas	1993	1992	1991	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982
Mesin, elektronik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kimia	2	3	2	2	2	2	2	2	2	4	4
Logam Dasar	3	2	3	3	3	3	4	3	4	2	2
Tekstil, pakaian	4	5	6	5	6	-	7	7	7	7	7
Kendaraan, pesawat	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3
Plastik, karet	6	6	5	6	5	5	5	5	5	6	6
Hasil nabati	7	7	7	7	7	7	6	6	6	5	5
Pulp dan kertas	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10
Alat optik dan fotografi	9	9	9	10	9	9	9	9	9	10	11
Makanan dan tembakau	10	10	10	9	10	10	10	10	10	9	5

Sumber: Pusat Data Bisnis Indonesia, 1994, disarikan dari data BPS Peringkat tahun 1993 berdasarkan data Januari - Agustus 1993.

Tabel 6. INDONESIA: Ringkasan Sektor Komoditas menurut SITC 3 digit yang secara potensial mempunyai Keuntungan Komparatif

SEKTOR PRIMER:	SEKTOR MANUFAKTUR:
<i>Agricultural Resource Intensive:</i>	<i>Unskilled Labor Intensive:</i>
034 : Ikan segar, dingin atau beku	652 : Benang tekstil
035 : Ikan kering, digarami atau diasapi	653 : Kain tenun dari serat buatan
036 : Udang, kerang dan sejenisnya	656 : Tule, kain beludru dsb.
037 : Olahan ikan, udang dan kerang	821 : Perabotan
054 : Sayur-sayuran segar, dingin	842 : Pakaian wanita, bukan rajutan
056 : Sayur-sayuran diawetkan	843 : Pakaian pria, rajutan
071 : Kopi dan pengganti kopi	844 : Pakaian wanita, rajutan
072 : Coklat	845 : Barang-barang lain dari tekstil
074 : Teh	846 : Perlengkapan pakaian dari kain tekstil
075 : Rempah-rempah	851 : Sepatu dan alas kaki
121 : Tembakau, lembaran, irisan dan sisanya	
232 : Getah karet sintetis, karet sintetis	<i>Physical Capital Intensive:</i>
245 : Fuel wood and wood charcoal	671 : Besi kasar, besi cor dan besi beton
246 : Serpihan butiran, dan sisa kayu	685 : Barang-barang dari timah hitam
248 : Kayu, diolah sederhana, bantalan kayu	687 : Barang-barang dari timah
424 : Minyak dan lemak nabati, mentah, diolah	
431 : Olahan minyak, lemak nabati dan hewani	<i>Human Capital Intensive:</i>
	553 : Kosmetika
<i>Mineral Resource Intensive:</i>	<i>Natural Resource Intensive:</i>
277 : Bahan penggosok alam	634 : Plywood, tripleks dsb.
286 : Biji uranium, thorium dan pekatannya	635 : Barang dari kayu dsb.
287 : Biji logam tidak mulia & pekatannya	661 : Semen, kapur dan bahan bangunan buatan pabrik
322 : Briket, batubara dan tanah gemuk	665 : Barang-barang kaca
333 : Minyak bumi, mentah	
334 : Hasil-hasil minyak bumi	<i>Technological Intensive:</i>
341 : Gas, alam dan olahan	562 : Pupuk buatan pabrik
	<i>Tidak diklasifikasikan:</i>
	971 : Emas bukan untuk moneter

Lihat: Tabel 2 untuk Perhitungan Lengkap berdasarkan SITC 3 digit.

pok hasil-hasil kayu (SITC 63), minyak nabati (SITC 4), gas alam cair (314), karet (231), logam bukan besi (68), tekstil (65) dan alas kaki (85). Produk elektronik, mainan anak, dan produk bahan makanan serta kembang gula juga mulai menunjukkan gambaran peningkatan RCA yang lebih besar sejak 1991.

Walaupun Indonesia telah berada pada jalur yang benar, tetapi masih terdapat beberapa catatan yang harus dibuat, yaitu perdagangan Indonesia masih kalah cepat dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, terutama sejak akhir tahun 1993

hingga awal tahun 1994. Bila penurunan ekspor Indonesia disebabkan karena resesi dunia, maka seharusnya ekspor negara lain juga mengalami penurunan. Tetapi pada kenyataannya ekspor negara-negara Asia lainnya tidak mengalami penurunan yang berarti seperti Indonesia. Oleh karena itu besar kemungkinan penyebab turunnya ekspor Indonesia bukanlah karena resesi dunia tetapi oleh sebab-sebab lain di dalam negeri. Pemasukan modal ke Indonesia juga masih lebih rendah dibandingkan Thailand, Malaysia, Singapura dan Cina, padahal Indonesia membutuh-

kan investasi yang besar, yaitu sekitar 28% dari PDB setiap tahun untuk dapat tumbuh sebesar 6%. Sedangkan kemampuan domestik untuk menyediakan dana masih lemah karena masih bertumpu pada utang perbankan. Bahkan dengan adanya masalah-masalah dalam perbankan nasional dewasa ini, maka mengandalkan dana pembangunan dari dana domestik khususnya dana perbankan menjadi tidak realistis. Alternatif lain seperti misalnya pinjaman luar negeri juga tidak dianjurkan mengingat *debt service ratio* kita yang sudah lebih dari 33% serta stok utang kita sudah kian membengkak. *Oleh sebab itu alternatif yang paling baik adalah ekspansi yang progresif dalam ekspor khususnya ekspor nonmigas.*

Ekspor Indonesia tidak dapat terlepas dari keadaan lingkungan internasional yang kondusif. Salah satu keuntungan yang dimiliki Indonesia adalah penyesuaian kebijakan yang dini dan juga faktor geografisnya yang berdekatan dengan Asia Timur, yang merupakan wilayah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat progresif. Jadi, dapat dikatakan bahwa reformasi yang dilakukan Indonesia bersamaan waktunya dengan kondisi global yang menguntungkan. Kecenderungan lain adalah berkembangnya perdagangan jasa. Bisnis internasional di bidang jasa seperti dalam jasa telekomunikasi, iklan, pengangkutan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan latihan serta jasa konsultasi merupakan bisnis yang tumbuh sangat progresif belakangan ini. Padahal peraturan dalam perdagangan jasa masih tergolong baru. Dengan adanya kecenderungan tersebut maka pertikaian perdagangan antarnegara menjadi suatu hal lumrah. Negara pengimpor

tidak rela bila pasar domestiknya dipenuhi oleh barang-barang impor, dan karena proteksi tarif sudah semakin diturunkan dan kuota impor dilarang, maka muncul alat proteksi baru seperti Pembatasan Ekspor Sukarela (VER), Ekspansi Impor Sukarela (*Voluntary Import Expansion*), anti dumping, bea penangkal subsidi, harga minimum atau penyalahgunaan standar sebagai persembunyian proteksi. Frekuensi pembajakan hak cipta juga sering dilakukan untuk mendapatkan teknologi tinggi dengan biaya seminimal mungkin.

Oleh sebab itu perundingan multilateral seperti GATT sangat dibutuhkan karena proses GATT mengusahakan agar hambatan-hambatan multilateral dapat dikurangi, serta hambatan-hambatan dibuat secara transparan, dan diterapkan dengan asas non-diskriminatif dan tunduk pada aturan-aturan multilateral. Dengan kata lain, GATT tidak hanya berarti liberalisasi, tetapi juga asas-asas dan aturan-aturan dalam pemakaian proteksi.

Esensi Putaran Uruguay: Ancaman dan Peluang Usaha

Perundingan GATT hingga tahun 1993 telah merampungkan delapan putaran perundingan multilateral yaitu Genewa (1947), Annecy (1949), Torquay (1950-51), Genewa (1955-56), Dillon (1961-62), Kennedy (1963-67), Tokyo (1973-79) dan Uruguay (1986-93). Tetapi tidak semua putaran GATT menghasilkan keputusan yang memuaskan. Keberhasilan GATT yang paling menonjol adalah penurunan tarif, tetapi penurunan ini tidak disertai dengan penurunan hambatan nontarif, bahkan hambatan

nontarif semakin menjadi-jadi seperti anti dumping, penangkalan subsidi, kuota impor, kuota tarif, pembatasan ekspor sukarela, harga minimum, pembelian domestik sukarela dari perusahaan asing. Persyaratan lain juga dimasukkan dalam perdagangan internasional seperti lisensi impor, persyaratan lingkungan, persyaratan investasi dan lainnya.

Setelah memakan waktu 6 tahun, akhirnya *Final Act* Putaran Uruguay ditanda-tangani di Marrakesh pada bulan April 1994. *Final Act* itu sendiri terdiri dari banyak persetujuan, salah satu yang terpenting adalah perbaikan akses pasar yang tertuang dalam skedul masing-masing negara atau kelompok negara peserta WTO, serta penguatan *asas-asas dan aturan-aturan multilateral*.

Ada dua hal penting dalam perbaikan akses pasar, yaitu: *Perdagangan hasil pertanian yang selama ini mendapat proteksi non-tarif yang sangat berat, serta penghapusan secara bertahap Multi Fibre Arrangement (MFA)*. Selain komitmen mengenai akses pasar, *penguatan asas-asas dan aturan-aturan multilateral* juga merupakan bagian penting dalam Putaran Uruguay. Misalnya dalam disiplin anti dumping dan bea masuk penangkalan subsidi, multilateralisasi penyelesaian pertikaian dengan mekanisme yang diperkuat, penegasan tentang tanda asal (*origin marks*), penilaian impor untuk maksud kepabean, inspeksi prapengapalan, disiplin mengenai standar dan transparansi kebijakan melalui Mekanisme Review Kebijakan Perdagangan. Selain itu diperkenalkan pula *General Agreement on Trade in Services (GATS)* yang merupakan liberalisasi perdagangan jasa, meliputi, antara lain pasokan lintas perbatasan atau derajat keleluasaan seseorang atau

perusahaan untuk memasok layanan di negara lain; kebebasan penduduk suatu negara untuk mengkonsumsi layanan di negara lain; kehadiran komersial atau kesempatan suatu perusahaan untuk memasok layanan melalui kehadiran di negara lain; kehadiran seseorang untuk memasok layanan di luar negaranya melalui kediaman (*stay*) sementara.

Dengan semakin menghilangnya hambatan langsung dalam perdagangan, maka berbagai jenis peraturan yang berkaitan dengan perdagangan diperkenalkan. Kelompok persoalan *hak milik intelektual* atau *TRIPs* menyangkut penguatan perlindungan seperti tercantum dalam penerimaan Konvensi Paris versi Stockholm 1971 untuk aneka hak milik industrial dan Konvensi Berne versi Paris 1971 serta Konvensi Roma 1961 untuk aneka karya kesusasteraan dan seni.

Komitmen Indonesia Dalam GATT dan Komitmen Negara Lainnya

Partisipasi negara berkembang dalam tujuh putaran GATT sebelum Putaran Uruguay sangat terbatas, dan hanya meliputi perlakuan khusus dan diferensial (kondisi khusus sebagai negara sedang berkembang dan karena itu permintaan akan perlakuan diferensial). Dalam Putaran Uruguay perlakuan khusus dan diferensial meliputi antara lain:

- (i) kewajiban yang lebih terbatas dibanding negara industri seperti dalam pemotongan subsidi ekspor;
- (ii) masa implementasi komitmen yang lebih panjang.

Beberapa unsur penting dalam komitmen Indonesia di Putaran Uruguay adalah:

- Tarififikasi hambatan nontarif sektor pertanian;
- Pengikatan 94,6% dari seluruh posisi tarif atau binding. Dalam bidang pertanian, 1014 tarif diikat pada 40%, 300 jenis tarif diikat pada >40%, dan 27 jenis tarif diikat pada < 40%. Sedangkan dalam bidang industri, Indonesia setuju untuk melakukan: 6848 tarif diikat pada 40%, dan 688 tarif diikat pada < 40%;
- Dalam sektor industri akan dihapus hambatan nontarif dalam 98 posisi dan penghapusan bea masuk tambahan (*surcharge*) dalam 172 posisi tarif selama 10 tahun;
- Penurunan tarif di banyak posisi dalam hasil pertanian;
- Dalam komitmen jasa dimasukkan: jasa bisnis, komunikasi, kesehatan, turisme, rekreasi dan transportasi;
- Dalam kaitannya dengan investasi (TRIMS): penghapusan persyaratan kandungan lokal;
- Partisipasi aktif dalam persetujuan TRIPs.

Namun demikian, dalam melihat peluang yang mungkin tersedia bagi Indonesia dengan ditanda-tanganinya Putaran Uruguay, kita perlu mengetahui bagaimana negara lain, baik

negara berkembang yang merupakan pesaing kita maupun negara maju yang merupakan tujuan pasar kita, mengikat diri mereka terhadap persetujuan Uruguay beserta skedul yang disepakatinya. Karena hanya dengan mempunyai gambaran sedemikian itu kita dapat merencanakan dan mengatur strategi perdagangan sebaik mungkin. Sayangnya informasi demikian itu belum tersedia, dan sampai sekarang informasi yang dapat diperoleh barulah sekedar garis besar persetujuan berbagai negara untuk meningkatkan akses pasar, seperti yang terlihat pada tabel 7.

Meskipun data mengenai komitmen serta skedul pemenuhan komitmen dari negara lain belum diperoleh, namun dampak *racheting effect* yang tercermin dalam percepatan setiap negara untuk saling berlomba menciptakan kondisi yang lebih efisien, tampaknya akan merupakan model yang dianut oleh setiap negara.

Dengan demikian pemantauan kebijakan terakhir dari setiap negara merupakan suatu keharusan yang dijalankan bukan saja oleh pemerintah Indonesia dan aparatnya di dalam dan luar negeri, namun terlebih lagi oleh para pengusaha sebagai pelaku mikro

Tabel 7. Penurunan Tarif di Negara-negara Dagang Utama (dalam %)

Negara	Industri	Pertanian
Kanada	46	33
NE	37	37
Jepang	56	36
AS	33	38
Australia	39	45
Selandia Baru	50	45
Swiss	32	
Swedia	33	
Finlandia	31	

Sumber: Pusat Data Bisnis Indonesia, berdasarkan Dokumen Otentik Persetujuan Perdagangan Multilateral GATT Putaran Uruguay.

yang sangat berkepentingan. Hanya dengan kegigihan memanfaatkan data dan menganalisis situasi, pengusaha akan dapat menarik manfaat dari komitmen baru yang ditawarkan secara berbeda besaran dan waktunya oleh masing-masing negara.

Dampak Positif Putaran Uruguay

Meskipun sukar untuk membayangkan secara rinci manfaat positif dari Putaran Uruguay, namun berbagai perhitungan yang dilakukan telah memberikan gambaran mengenai perubahan-perubahan variabel ekonomi seperti PDB, ekspor dan impor. Beberapa studi yang pernah dilakukan memperkirakan bahwa dampak Putaran Uruguay akan cukup signifikan, dalam hal ini:

- PDB dunia diperkirakan akan meningkat sebesar \$230 miliar dalam tahun 2005, bila dibandingkan seandainya tidak ada Putaran Uruguay;
- Perdagangan barang secara riil (*merchandise trade*) diperkirakan akan meningkat sekitar 12% atau \$745 miliar pada harga konstan dollar 1992;
- Akan terjadi perubahan keunggulan komparatif ekonomi, yang menimbulkan gelombang baru relokasi industri. Perhitungan di atas belum mencakup dampak dinamik yang terkandung di dalamnya, karena pada dasarnya di antara hasil-hasil GATT banyak yang sifatnya kualitatif seperti halnya tarififikasi dan penguatan disiplin.

Meskipun terdapat banyak pihak yang berpendapat bahwa negara berkembang, seperti halnya Indonesia, akan dirugikan dengan adanya Putaran Uruguay, namun analisis yang mendalam menunjukkan bahwa pendapat tersebut kurang cermat.

Misalnya, studi yang menyatakan Indonesia akan rugi setelah Putaran Uruguay menggunakan tarif tahun 1985, yang tentu akan sangat berbeda dengan tarif tahun 1995 waktu Putaran Uruguay mulai diimplementasikan. Bila kebijaksanaan makro yang hati-hati tetap dipertahankan dan Indonesia tetap konsisten dalam membuat deregulasi lanjutan, maka peluang Indonesia untuk memanfaatkan Putaran Uruguay akan sangat besar. Meskipun demikian, dampak persetujuan Putaran Uruguay terhadap berbagai komoditas ekspor Indonesia akan sangat bervariasi.

Salah satu contoh adalah *tekstil dan pakaian jadi*, yang merupakan primadona ekspor Indonesia. Negara maju hingga saat ini masih menguasai perdagangan tekstil dunia terutama Lembaran Tekstil, dimana sampai saat ini negara maju banyak berlingkungan pada Perjanjian Serat Ganda (*Multi Fibre Agreement - MFA*) yang merupakan penyimpangan dari GATT, walaupun dinyatakan sebagai penyimpangan yang sukarela (*voluntary restraint*). Dengan adanya Persetujuan Putaran Uruguay mengenai tekstil dan pakaian jadi, semua kuota impor berdasarkan MFA akan dihilangkan dalam kurun waktu 10 tahun. Setelah sepuluh tahun, perdagangan tekstil dan pakaian jadi sepenuhnya akan diatur dalam GATT. Terdapat dua aspek utama dalam penghapusan MFA yaitu: *integrasi* dan *pertumbuhan kuota*. Integrasi berhubungan dengan persentase impor yang hanya terkena tarif, sehingga tidak ada lagi *quantitative import restriction* untuk barang yang terintegrasi. Sedangkan pertumbuhan kuota berhubungan dengan kenaikan kuota untuk produk yang tidak terintegrasi. Bagaimana dampak persetujuan Uruguay terhadap ekspor

tekstil dan pakaian jadi Indonesia? Dampak perjanjian ini terhadap alokasi kuota Indonesia belum dapat ditentukan secara pasti. Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan Amerika, Masyarakat Eropa, Kanada dan Norwegia. Di antara perjanjian tersebut yang terpenting adalah perjanjian dengan Amerika dan Kanada, dimana Indonesia mempunyai kuota yang paling besar dan berharga di kedua pasar tersebut. Sebagian besar kuota tersebut adalah produk yang sensitif dan, dalam skema penghapusan MFA seperti dijelaskan di atas, produk-produk tersebut kemungkinan besar akan merupakan jenis komoditas terakhir yang diintegrasikan ke GATT. Meskipun demikian, *dalam jangka pendek*, keuntungan yang jelas dapat diperoleh Indonesia adalah kemungkinan diperolehnya peningkatan kuota. Namun hal yang patut diperhatikan adalah peningkatan kuota ini tidak saja berlaku untuk Indonesia tetapi untuk semua negara pengekspor. Oleh sebab itu untuk memaksimalkan keuntungan dari pertumbuhan kuota tersebut, maka *sistem pembagian kuota di Indonesia harus diubah menjadi lebih transparan dan jatah kuota yang belum terpakai harus cepat diberikan kepada eksportir yang masih dapat mengekspor*. Sedangkan *dalam jangka panjang*, penghapusan kuota MFA akan menghilangkan sistem pembagian kuota di Indonesia. Bagi eksportir yang terbiasa memperoleh kuota dan tidak dapat bersaing di pasaran dunia, terdapat kemungkinan bahwa mereka akan meminta kepada pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap ekspor. *Pengaturan terhadap ekspor akan menghambat pertumbuhan ekspor Indonesia dan karenanya harus dihindari*.

Oleh sebab itu mudah dibayangkan bahwa dampak perjanjian terhadap Industri Tekstil dan Pakaian Jadi bisa sangat beragam. Ada sebagian produsen yang dapat meningkatkan operasi secara internasional dan akan memperoleh keuntungan dengan meningkatnya pendapatan di negara berkembang walaupun keuntungan per unit menurun. Tetapi ada pula produsen yang karena meningkatnya kuota harus menghadapi persaingan dari negara lain yang mempunyai tingkat upah pekerja yang sama atau bahkan lebih rendah. Penghapusan kuota MFA juga akan mempercepat perubahan yang terjadi pada pasar global. Perubahan tidak hanya pada upah pekerja yang semakin rendah, tetapi juga dalam memenuhi permintaan pembeli untuk mengirim barang dalam waktu yang singkat, dan pesanan dalam jumlah kecil tetapi beragam. Sementara itu, upaya para pengusaha untuk meningkatkan daya saing perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang memungkinkan terciptanya efisiensi untuk menekan biaya produksi – seperti misalnya perbaikan sarana transportasi.

Dampak lainnya adalah dalam *bidang non-pertanian atau manufaktur*. Putaran Uruguay menyatakan bahwa komitmen yang harus dilakukan semua anggota untuk membuka pasar barang sektor manufaktur dibedakan untuk Negara Maju dan Negara Berkembang. Penurunan tarif untuk negara maju dilakukan dalam waktu empat tahun setelah GATT 1994 dilaksanakan pada tingkat yang baru yang lebih rendah sesuai dengan perjanjian untuk menurunkan tarif. Dengan GATT 1994 cakupan untuk tarif yang diikat di negara maju meningkat dari 78% men-

jadi 99%. Sedangkan penurunan tarif untuk semua produk manufaktur adalah sebesar 38% yaitu dari 6,3% menjadi 3,9%. Sedangkan untuk negara berkembang, komitmen untuk menurunkan tarif adalah sebesar 24% untuk jangka waktu yang lebih lama yaitu 10 tahun. Untuk pertama kalinya, NSB juga harus mengikat tarif secara menyeluruh pada tingkat yang berarti, yaitu pengikatan tarif terhadap paling sedikit 90% dari seluruh klasifikasi tarif dan 90% dari seluruh impor, serta pengikatan tarif pada tingkat 40% atau kurang. Komitmen untuk penurunan atau penghapusan hambatan non tarif tidak ditentukan. Pengikatan tarif dari seluruh kategori tarif yang ada mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dari 22% menjadi 72%.

Bagaimana halnya dengan Indonesia? Meskipun banyak pihak menganggap bahwa komitmen Indonesia kurang "berarti", namun komitmen itu tetap mempunyai arti penting untuk membatasi peningkatan proteksi yang tidak efisien di dalam negeri, karena Indonesia tidak akan dapat meningkatkan tarif di atas 40% untuk produk yang termasuk dalam daftar yang cakupannya sangat luas (yaitu 94,6% dari total barang manufaktur). Perjanjian mengenai penghapusan nontarif dan bea masuk tambahan dalam 10 tahun diharapkan akan mengurangi penggunaan dua instrumen tersebut untuk kepentingan proteksi.

Salah satu perbedaan yang esensial antara hasil Putaran Uruguay dengan Putaran sebelumnya adalah diperkenalkannya berbagai komitmen dalam bidang jasa, atau yang dikenal dengan *General Agreement on Trade in Services (GATS)* sebagai agenda perundingan multilateral. Persetujuan

yang dicapai baru mencapai hal-hal yang menyangkut prinsip dasar saja, dimana setiap negara bebas memilih sektor jasa yang akan dimasukkan dalam komitmennya. Kebanyakan negara berkembang hanya memasukkan sektor turisme, seperti halnya Indonesia. Namun secara umum, bagaimana implikasinya dalam waktu mendatang bagi Indonesia masih rancu. Seperti halnya dalam sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan, dimana terdapat banyak jasa intra-perusahaan yang dipakai sebagai input akan tetapi dicatat sebagai nilai tambah sektor yang bersangkutan. Sedangkan dalam jasa-jasa yang sangat padat aktiva tetap seperti halnya dalam penerbangan dan telekomunikasi, nilai tambah jasa lebih banyak berhubungan dengan aktiva tetap tersebut, daripada dengan jasa itu sendiri. *Tradeability* jasa atau kemampuan jasa untuk diperdagangkan antarperbatasan juga meningkat seiring dengan meningkatnya perdagangan barang. Jelaslah dari uraian di atas, bahwa liberalisasi dalam perdagangan jasa lebih sulit dibandingkan perdagangan barang, karena pengalaman dunia dalam merundingkan jasa masih pendek dan resistensi jasa jauh lebih kuat daripada perdagangan barang. Berbagai contoh keengganan yang mungkin timbul dalam merealisasikan liberalisasi perdagangan jasa antara lain: liberalisasi jasa medik terbentuk pada resistensi asosiasi profesional, dokter dan asosiasi rumah sakit yang selalu menyebut jasa medik sebagai jasa istimewa, liberalisasi jasa pendidikan terbentuk pada prinsip nasionalisme, dan jasa keuangan yang dianggap terlalu "strategis" untuk dibuka kepada pihak asing.

Keunggulan komparatif sektor jasa Indonesia belum dapat ditentukan

secara pasti karena membutuhkan penelitian lebih lanjut. Tetapi secara sepintas dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan Indonesia dalam jasa masih berorientasi ke dalam. Keterbukaan pemasukan modal dalam sektor jasa masih penuh ketidakpastian, seperti baru-baru ini peraturan PMA yang memungkinkan masuknya modal asing ke industri pers dan media massa ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Pers. Selain itu, manajemen organisasi jasa di Indonesia belum sebaik manajemen organisasi barang, dimana pendidikan jasa di Indonesia masih sangat kurang memadai. Salah satu faktor yang tampaknya turut berperan adalah budaya "enggan rewel" yang mencoba menghindari dari tuntutan terlalu banyak bagi mutu pelayanan jasa yang diterimanya, sehingga penyedia jasa tidak tertantang untuk meningkatkan pelayanan mereka. Berbagai faktor ini tampaknya akan turut berperan dalam menentukan kesiapan sektor jasa kita untuk bersaing secara internasional, dan menerapkan kebijakan multi-lateral di dalamnya.

Persetujuan mengenai hak milik intelektual (*Trade Related Intellectual Property Rights*, atau *TRIPs*) merupakan produk Putaran Uruguay yang sering dianggap sebagai produk tambahan untuk menekan negara berkembang dalam meningkatkan pasarannya di dunia. Salah satu ciri unik dari *TRIPs* adalah bahwa ia lebih *membicarakan norma dan standar*, serta menetapkan kesesuaian penuh (*full compliance*) terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang hak sebagai persyaratan minimal. Selain itu ia memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat serta mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa dan juga hak bagi

negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang. Paket persetujuan ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995. Tetapi Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang diberi hak untuk peralihan selama 5 tahun, dan bila Indonesia memanfaatkan seluruhnya, maka persetujuan *TRIPs* baru efektif pada tahun 2000. Ketentuan dalam *TRIPs* yang sangat penting bagi dunia usaha Indonesia adalah ketentuan mengenai penegakan hukum yaitu tentang *Special Requirements Related to Border Measures* yang antara lain mengatur hak pemilik/pemegang hak untuk menahan barang impor yang merupakan hasil pelanggaran Merek atau Hak Cipta yang dimilikinya.

Salah satu bentuk perjanjian yang tampaknya akan sangat mempengaruhi sektor produksi di Indonesia adalah perjanjian mengenai Aturan-Aturan Investasi yang Menyangkut Perdagangan (*Trade Related Investment Measures* atau *TRIMS*), yang merupakan isu baru yang dimasukkan GATT untuk peraturan investasi di negara bersangkutan yang dikaitkan dengan persyaratan yang dapat mempengaruhi perdagangan. Negara maju seperti Amerika dan Jepang sangat mendukung *TRIMS* sedangkan negara berkembang kurang mendukung dikutsertakannya *TRIMS* dalam perundingan GATT. Pada dasarnya negara berkembang ingin agar penertiban *TRIMS* dilakukan atas dasar kasus per kasus dan bukan secara menyeluruh, karena bagi negara berkembang, *TRIMS* masih diperlukan sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan dan merupakan salah satu instrumen kebijaksanaan negara berkembang

untuk mengatasi persaingan restriktif oleh pemasukan modal asing.

Karena kesepakatan tidak tercapai dalam TRIMS, maka jalan tengah diambil dengan merumuskan daftar TRIMS yang bertentangan dengan GATT (*illustrative list*). Dua prinsip dasar yang menentukan apakah TRIMS bertentangan dengan GATT adalah *national treatment* dan *restriksi kuantitatif terhadap impor*. TRIMS yang dianggap melanggar *national treatment*, antara lain persyaratan pembelian atau penggunaan bahan baku, barang penolong, komponen atau suku cadang dalam negeri dalam suatu kegiatan usaha atau produksi suatu barang, baik yang diproduksi sendiri (*inhouse*) maupun yang diperoleh dari perusahaan dalam negeri lainnya (*out-house*). Contohnya: persyaratan kandungan lokal (*local content requirements*). Persyaratan lainnya adalah persyaratan pembelian atau pemakaian bahan impor yang dibatasi sejumlah atau senilai produk yang akan diekspor (*trade balancing requirement*). Sedangkan TRIMS yang dianggap melanggar restriksi kuantitatif terhadap impor, antara lain pembatasan impor produk yang dipakai dalam proses produksi atau terkait dengan produksi lokal yang harus diekspor (*import restriction related to trade balancing*), pembatasan impor yang dipakai dalam proses produksi atau terkait dengan produksi lokal dengan membatasi akses devisa yang dapat diperoleh oleh perusahaan yang bersangkutan (*import restriction related to trade balancing/foreign exchange*), dan pembatasan ekspor baik menurut jenis, jumlah maupun nilai produk atau persentase dari volume atau nilai produk lokal yang dihasilkan (*export restrictions related to trade*

balancing/local production).

Penghapusan TRIMS yang telah didaftarkan kepada World Trade Organization (WTO) harus dilakukan dalam dua tahun untuk negara maju, lima tahun untuk negara berkembang dan tujuh tahun untuk negara berkembang paling terbelakang. Negara berkembang dan negara berkembang paling terbelakang dapat mengajukan perpanjangan waktu transisi berdasarkan berbagai kesulitan yang dialami karena masalah perdagangan, neraca pembayaran dan tingkat kemajuan yang dicapai. Persetujuan TRIMS ini mencakup tingkat nasional dan daerah.

Bagi Indonesia, sesuai dengan *illustrative list* maka peraturan investasi yang harus didaftar hanya *persyaratan kandungan lokal* yang saat ini masih berlaku terhadap industri kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, serta *pembuatan beberapa mesin dan peralatan*. Dereglasi investasi seperti PP 20 merupakan suatu perombakan signifikan dan telah menghapus persyaratan-persyaratan yang dapat dianggap sebagai TRIMS yaitu persyaratan pemilikan domestik dan persyaratan ekspor. Rencana penyatuan UU PMA 1967 dan UU PMDN 1968 juga merupakan suatu langkah ke depan dimana penyatuan PMA dan PMD merupakan "national treatment" terhadap PMA.

Peluang Usaha Pasca GATT – Bagaimana Memanfaatkannya?

Secara garis besar, ada 3 pesan yang tersirat dari kesimpulan Putaran Uruguay, yaitu: (1) *Pasaran di semua negara anggota akan semakin terbuka*, yang disertai dengan persaingan yang keras dan semakin mendalam, baik di pasar dalam negeri maupun inter-

nasional; (2) *Rule making yang semakin ketat dan diawasi secara terus menerus*. Dalam hal ini, aturan main perdagangan internasional akan diawasi oleh suatu badan yang sifatnya lebih resmi dan *decisive* daripada sekadar *Agreement on Trade and Tariff* seperti halnya GATT; yakni WTO (*World Trade Organization - le mondiale*). Berbagai peraturan yang akan dilaksanakan dengan ketat antara lain: Peraturan Anti Dumping perlu diperbaiki, diperjelas, dan diperketat; *Government Procurement* perlu dicari penggantinya; *Price evaluation* akan diseragamkan; *Rules of origin* diterapkan dengan ketat dengan sanksi yang cukup berat; *Import licencing procedures* diseragamkan; *Countervailing measures*; *Trade Policy Review Mechanism*. Ini berarti, *rules of the games* semakin jelas dan terperinci, serta disiplin semakin ditegakkan. (3) *Timbulnya isu-isu baru*, dimana hasil dari *Uruguay Round* ini banyak memunculkan berbagai hal dan bidang yang dulu tidak dibahas dalam *rounds* sebelumnya seperti GATS, TRIPS, dan TRIMS yang antara lain menonjol adalah *local content requirements* atau dikenal dengan "*deletion program*" yang berhubungan dengan ketentuan investasi yang mempengaruhi perdagangan. Ini berarti, semakin banyak isu yang dikaitkan dengan perdagangan, terutama "*non-border issues*", seperti misalnya masalah subsidi, anti dumping dan lain-lain. Salah satu yang sangat kontroversial adalah masalah *social issues*, seperti misalnya upah buruh, hak buruh, hak asasi manusia, dan lain-lain yang dikaitkan dengan GSP (Indonesia) atau MFN status (Cina).

Satu hal yang disadari dan sering dicanangkan adalah pentingnya

peningkatan efisiensi demi mencapai sasaran pasaran ekspor yang lebih luas baik jangkauannya maupun jenisnya. Namun sering dilupakan, bahwa salah satu hal yang tidak terlepas dari usaha peningkatan efisiensi tersebut adalah penciptaan pasar dalam negeri yang terbuka untuk pesaing-pesaing kita. Implikasi dari keinginan peningkatan efisiensi adalah mencabut peraturan-peraturan yang menimbulkan distorsi pasar beserta segala inefisiensi yang ditimbulkannya. Seperti misalnya dalam hal beberapa sektor yang tampaknya cukup menjanjikan seperti produk elektronik dan makanan olahan. Deregulasi yang menghilangkan distorsi dalam negeri untuk industri hulu dari beberapa sektor ini akan menimbulkan efek positif bagi industri hilirnya. Meskipun masih banyak dirasakan ketidak-konsistenan kebijakan, namun salah satu contoh yang tampaknya memberikan gambaran yang lebih cerah adalah industri pertanian, yang untuk hal-hal tertentu dirasakan cukup liberal, dimana Indonesia telah menyepakati dari NTB ke *tariff barriers*, serta semuanya *effectively binding*. Hal ini merupakan langkah pertama yang penting untuk pengembangan industri pengolahan makanan di Indonesia. Oleh sebab itu, peningkatan *market access* yang pada hakekatnya merupakan dorongan untuk meningkatkan efisiensi dapat dilakukan dengan meningkatkan pesaing dalam arti membuka kesempatan bagi pendatang baru.

Pemerintah dalam hal ini memegang peranan yang sangat besar untuk memungkinkan terciptanya suasana yang kondusif, dan memungkinkan pemanfaatan hasil Putaran Uruguay dengan tidak melakukan kebijakan yang berten-

tangan dengan spirit peningkatan efisiensi dan pengurangan proteksi. Namun segala usaha pemerintah akan kurang berarti apabila pihak pengusaha sebagai pelaku mikro tidak mampu memanfaatkan iklim usaha baru Pasca Putaran Uruguay dengan sebaik-baiknya. Putaran Uruguay memberikan berbagai peluang, sekaligus tantangan dan ancaman. Hal terpenting bagi kita semua adalah bagaimana cara pengusaha memanfaatkan peluang yang ada ini? Pada hakekatnya, ada beberapa hal yang harus sepenuhnya dipahami oleh dunia usaha mengenai dampak dari Putaran Uruguay pada kebijakan perusahaan.

1. Corporate Plan

Apabila diperhatikan, maka dengan adanya persetujuan Putaran Uruguay, pengusaha tidak lagi dapat menjalankan usahanya hanya berdasarkan pertimbangan keuangan saja, atau masalah bank serta sumber dana. Mengapa?

a. Dengan meningkatnya persaingan dan semakin terbukanya pasar dunia, maka terdapat *tendensi penurunan harga* dari hampir semua jenis barang dan jasa yang ditawarkan di pasar dunia dan di pasar domestik suatu negara, karena semakin banyak 'player' di dunia yang terus menerus berusaha meningkatkan efisiensi demi mempertahankan hidupnya. Ini berarti, margin keuntungan akan semakin menipis, dan *corporate plan* suatu perusahaan harus memasukkan pertimbangan ini dalam membuat rencana produksi dan investasinya. Permainan angka untuk memperoleh dana bank atau pasar modal mungkin justru akan menjerumuskan perusahaan sendiri ke dalam kesukaran.

b. Sekiranya terjadi suatu ketidaksepakatan (*disputes*, seperti anti dumping misalnya), maka adanya *corporate plan yang baik akan bisa membantu menyediakan informasi yang siap pakai untuk menyelesaikan disputes*. Dengan perkataan lain, *corporate plan yang baik harus ditunjang dengan 'bank data' yang prima*, agar analisis perusahaan tidak keliru.

c. Putaran Uruguay men-sah-kan *penerapan safe-guards* yang bisa dilakukan oleh tiap negara, setiap kali mereka merasa bahwa industri dalam negerinya terancam. Untuk itu kita perlu mempunyai data yang baik mengenai produksi dan impor suatu negara, agar kita terhindar dari kemungkinan terkena *safeguards* yang diberlakukan negara lain, yang di luar kesadaran kita karena komisin informasi.

d. Patut disadari juga bahwa terbukanya perdagangan sebagai akibat Putaran Uruguay bukan hanya memberikan peluang bagi barang ekspor kita, atau merupakan ancaman karena semakin ketatnya persaingan di pasar dunia; namun implikasi yang nyata lainnya adalah terpengaruhnya harga jual dalam negeri sebagai akibat masuknya barang dari pasar dunia dengan harga yang semakin rendah. Dengan demikian, semakin tidak terhindarkan, bahwa *efisiensi serta peningkatan produktivitas merupakan prasyarat utama untuk tetap survive*.

2. Pelecehan Aturan

Tampaknya belum semua pengusaha menyadari bahwa pelecehan aturan perdagangan yang telah disepakati dalam Putaran Uruguay akan menimbulkan konsekuensi besar

dan menyeluruh bagi seluruh pengusaha Indonesia, walaupun yang melakukan hanya satu orang saja. Misalkan saja, seorang pengusaha melecehkan peraturan mengenai *rules of origin*, dimana eksportir Indonesia mengekspor pakaian ke Singapore yang kemudian dengan proses yang sangat minimal diekspor kembali oleh Singapore ke USA. Maka dalam hal ini, pemerintah USA dapat menggunakan *rule of circumvention*, dan menerapkan sanksi kepada Indonesia (bukan hanya ke pengusaha yang bersangkutan) karena dianggap telah melanggar aturan main mengenai *rules of origin*. Bahkan, yang diinginkan oleh USA (dan belum disepakati oleh Indonesia) adalah *new rules of circumvention*, dimana sanksi dapat diterapkan terlebih dahulu tanpa harus menunggu hasil penyelidikan dari suatu komite penyelidik. Sanksi yang diberlakukan (misalnya penghentian sementara ekspor Indonesia ke Amerika) baru bisa dianulir kemudian setelah pengusaha kita tidak terbukti bersalah, dan pengembalian hak mengekspor baru diberikan apabila hak ekspor Singapore dikurangi sebanyak jumlah yang di-sengketa-kan tadi. Dengan demikian, apabila *new rules of origin* ini dapat diterima, dampak kesalahan akan berakibat sangat besar dan lama bagi kinerja ekspor kita. Dengan demikian, pengusaha harus betul-betul sadar bahwa "*nila setitik merusak susu sebelanga*" bisa diberlakukan.

3. Kualitas dan Waktu Penyerahan

Dengan semakin banyaknya pesaing, maka kegagalan memenuhi janji dalam hal kualitas dan waktu penyerahan akan menyebabkan per-

usahaan sangat mudah kehilangan pangsa pasar, dan semakin sukar merebutnya kembali apabila kredibilitas pengusaha merosot. Oleh sebab itu perlu diusahakan untuk selalu memenuhi janji, baik dari segi kualitas maupun waktu penyerahan (*delivery*).

4. Kebutuhan akan *Competent Lawyer*

Gambaran di atas menunjukkan bahwa semakin terbukanya perdagangan serta begitu banyaknya dan rumitnya peraturan akan kesepakatan yang dicapai mengharuskan kita, terutama pengusaha, untuk menyadari segi hukum dari suatu perjanjian perdagangan. Dengan demikian, penggunaan pengacara (*lawyer*) yang bermutu dan menguasai hukum perdagangan internasional yang mutakhir, merupakan sebuah keharusan.

5. Pandai Mengidentifikasi Masalah dan Menentukan "*Strategic Alliances*"

Perusahaan merupakan pihak yang paling mengetahui letak sumber keunggulan mereka, karena setiap jenis usaha dan setiap jenis produk mempunyai sifat yang spesifik. Dalam hal ini kalau harga yang merupakan sumber keunggulan, maka program *cost reduction* merupakan hal terpenting. Kalau *pekerja* yang merupakan sumber daya saing, maka tingkatkan produktivitas maupun loyalitas pekerja. Kalau *sumber daya alam* terpenting dalam proses produksi, maka usahakan diversifikasi dan jangan lupa menjaga kelestarian lingkungan. Apabila *differential advantage* yang menjadi kunci, perlu dipikirkan investasi dalam *reverse engineering*, dan perlu giat mengadaptasi teknologi

melalui *sub-contracting*, *franchising*, *licensing* dan lain-lain. Kalau bergerak dalam bidang jasa, lakukan investasi dan pendidikan serta peningkatan *service culture* di kalangan pekerja.

6. Pemantauan Peraturan Unilateral Baru

Salah satu hal yang saat ini masih merupakan kelemahan bagi banyak pengusaha di negara berkembang adalah kemampuan atau kesadaran untuk mengikuti dengan seksama peraturan baru di berbagai segi yang berkaitan dengan perdagangan internasional, yang diberlakukan suatu negara secara unilateral tanpa menyalahi persetujuan Uruguay. Salah satu contoh adalah jenis hambatan non-tarif seperti *Health Certificate* bagi produk pertanian dan bahan makanan. Bersatunya pasar Eropa memberikan peraturan baru yang tercantum dalam *Council Directive 91/493/EC* yang diberlakukan mulai Agustus 1994, yang diberlakukan khusus bagi produk dari negara berkembang. Setiap produk diharuskan menyandang sertifikat kesehatan yang didasarkan atas konsep HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*), dimana sistem pengawasan mutu berlaku mulai dari pembenihan pemanenan, bahan baku, pengolahan, penyimpanan, distribusi, pemasaran, hingga produk sampai di tangan konsumen. Hal ini mempunyai implikasi yang sangat besar bukan saja bagi pengusaha Indonesia, akan tetapi juga bagi para aparat pemerintah dan swasta yang terlibat di dalam pemberian sertifikat layak ekspor yang sesuai dengan HACCP. Hal ini membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak kecil, serta kesiapan mental secara total untuk menyadari bahwa 'menganggap enteng' masalah

ini akan berakibat fatal terhadap pasar ekspor kita. Dalam era globalisasi semacam ini, kehilangan pasar akan sangat berarti, karena akan sukar untuk merebutnya kembali.

7. Peningkatan 'Data Base'

Salah satu sumber keunggulan yang perlu disadari pengusaha adalah pemilikan dan pemanfaatan sumber data, sehingga setiap keputusan dapat dibuat seakurat mungkin serta secepat mungkin agar peluang yang ada tidak terbang. Oleh sebab itu, berbagai ringkasan data yang diberikan dalam tulisan ini hendaknya dapat merupakan sekadar acuan gambaran peluang komoditas yang mampu bersaing di masa datang. Sayangnya, data mengenai komitmen berbagai negara lain belum tersedia, sehingga dampak yang sebenarnya akan dirasakan oleh pelaku mikro - para pengusaha - masih sukar diperkirakan dengan tepat.

Referensi

- Miranda S. Goeltom (1993), "The changing structure of trade in goods and services: The case of Indonesia, 1980-1992," in *Pacific Economic Outlook - Structural Issues - Background Papers*, Japan Committee for Pacific Economic Outlook, Osaka.
- Miranda S. Goeltom (September 1993), "Pandangan Makro tentang eksistensi dan peranan BUMN dalam menyongsong PJPT II dan era globalisasi," makalah disampaikan pada rapat kerja Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia, Bandung.

Miranda S. Goeltom (12 Juli 1994), "Esensi dan Dampak Putaran Uruguay Terhadap Perekonomian Indonesia," makalah pada pertemuan Pimpinan dan Staf Bank Rakyat Indonesia se Indonesia, Jakarta.

Prasetya Mulya (15 Juni 1994), Berbagai makalah serta rangkuman kesimpulan yang disampaikan oleh berbagai ahli dan pengamat dalam Seminar "Benang Merah Putaran Uruguay", Jakarta.